

## Susi Pudjiastuti Usul Kapal Nelayan Ukuran 10 GT Tak Perlu Urus Izin

JAKARTA (IM) - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan agar kapal nelayan kecil hingga 10 gross ton (GT) tidak perlu mengurus izin-izin. Sebab, para nelayan yang pendapatannya sama seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) itu harus mengeluarkan uang banyak untuk mengurus izin layak operasi hingga izin menandatangani ke kantor pusat.

"Kemudian seperti pengurusan izin, juga dulu zaman saya, nelayan kapalnya di bawah 10 GT tidak usah ada izin-izin, tidak usah urus apa-apa. Sekarang katanya harus ke pusat lagi," kata Susi saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Susi lantas mencontohkan para nelayan di Labuan Bajo dan Alor yang harus pergi mengurus izin ke Provinsi Kupang. Biaya yang dibutuhkan ke Kupang dengan naik pesawat mencapai Rp 1-2 juta.

Belum lagi, menunggu izin keluar dari pemerintah membutuhkan waktu lama. Tidak jarang masa berlakunya sudah habis untuk menunggu izin-izin lain yang belum keluar.

"Yang saya pikir itu hal yang gila, musykil, untuk orang dari Labuan Bajo wa-

laupun tidak di pusat, harus ke provinsi. Kemudian kalau dia harus nunggu SLO (surat laik operasi/SLO). Kalau dia sudah beli S, SLO-nya enggak keluar karena terlambat, S-nya habis, uangnya habis, tak bisa melaut," ungkap Susi.

Susi meminta para pembuat kebijakan memudahkan pekerjaan para nelayan kecil dengan tidak perlu mengurus izin berbelit-belit.

Terlebih, UMKM dengan penghasilan yang sama pun tidak dikenakan pajak sesuai aturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi kalau kita mau membangun masyarakat pesisir, yang pertama kita lakukan adalah satu, kita harus evaluasi dan lihat keberpihakannya sampai mana dan seperti apa. Permasalahan keberpihakannya tidak ada, mau step berikutnya, ya percuma," katanya.

"Ngapain orang punya kapal 10-12 meter harus urus izin. Negara merdeka berdaulat, rakyatnya mau berusaha, nelayan itu UMKM menurut saya, mereka bermodal keluaran uang, bahkan berisiko nyawa. Jadi UMKM yang all out. Bukan cuma berdagang di toko," kata Susi. ● han

## KPI Putuskan Tak Ada Pelanggaran dalam Tayangan Azan Ganjar Pranowo

JAKARTA (IM) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memutuskan tidak ada pelanggaran dalam tayangan azan yang menampilkan sosok bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, di salah satu stasiun televisi swasta.

Keputusan itu diambil pada 13 September 2023 melalui rapat pleno KPI. "Berdasarkan hasil forum klarifikasi dan rapat pleno, KPI menilai bahwa siaran azan maghrib yang menampilkan salah satu sosok atau figur publik tidak melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)," demikian dikutip dari siaran pers KPI Pusat.

Sebelum mengambil keputusan, KPI lebih dulu memanggil pihak stasiun televisi swasta terkait untuk dimintai klarifikasi. Proses klarifikasi digelar Senin (11/9). Dari klarifikasi tersebut, KPI tak menemukan adanya dugaan pelanggaran. Ke depan, KPI mengingatkan semua lembaga penyiaran untuk tetap men-

jaga independensi selama pelaksanaan Pemilu 2024. "KPI mengimbau kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tetap mengedepankan prinsip adil, tidak memihak, dan proporsional dalam menyiarkan program siaran demi menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 yang demokratis," demikian siaran pers KPI Pusat.

"Adapun langkah selanjutnya terkait isi siaran kepemilikan yang berpotensi melanggar, KPI akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi bersama Gugus Tugas yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), KPI dan Dewan Pers," lanjut siaran pers itu.

Sebelumnya, kemunculan Ganjar dalam tayangan azan maghrib di sebuah stasiun televisi jadi sorotan. PDI-P membantah bahwa pihaknya berupaya melakukan politik identitas dengan menampilkan sosok Ganjar dalam tayangan itu. ● mei



FOTO: ANTARA

### DAHLAN ISKAN DIPERIKSA KPK

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan (kiri) berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/9). Menteri BUMN periode 2011-2014 itu diperiksa sekitar enam jam sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2014.

## 1.462 Kasus Korupsi di Daerah, Mayoritas Gratifikasi dan Suap

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri mengungkap, hingga 11 September 2023, ada 1.462 perkara korupsi di daerah. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan perkara suap dan gratifikasi, yang jumlahnya 958 kasus.

Data ini Firlil sampaikan di hadapan puluhan kepala daerah dalam acara Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Rabu (13/9). "Yang paling banyak adalah gratifikasi dan penyuapan, itu paling banyak 65,5 persen," kata Firlil.

Jumlahnya mencapai 324 kasus (22,2 persen). Lalu, ditemukan 57 kasus (3,9 persen) penyalahgunaan anggaran dan 57 kasus (3,9 persen) tindak pidana pen-

cucian uang (TPPU). Perkara korupsi lainnya yakni, 28 kasus (1,9 persen) pungutan atau pemerasan, 25 kasus (1,7 persen) perizinan, dan 13 kasus (0,9 persen) perintang proses KPK. Secara garis besar, kata Firlil, korupsi di daerah banyak berkaitan dengan penerimaan suap untuk tiga hal. Pertama, pengurusan izin.

"Kedua, tindak pidana korupsi terjadi karena seringnya pengadaan barang dan jasa. Ketiga barulah urusan penempatan urusan mutasi dan demosi," jelasnya.

Menurut Firlil, angka korupsi di daerah dapat ditekan melalui peran APIP. APIP berfungsi sebagai pengawas sejak pemerintah daerah (pemda) merencanakan kebijakan. Selanjutnya, APIP juga berperan mengawasi pelaksanaan proyek pemda. ● mei

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



### MK TOLAK GUGATAN MASA BERLAKU SIM SEUMUR HIDUP

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irfan Pol Firman Shantyabudi (tengah) meninggalkan ruang sidang usai mengikuti sidang putusan Pengujian Materiel Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (14/9). MK menolak permohonan uji materi yang diajukan Arifin Purwanto terkait permintaan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup.

# Mendagri Sebut Banyaknya Tenaga Honorer Titipan di Pemda Bebani APBD

Tenaga honorer banyak diisi oleh tim sukses (timses) atau keluarga kepala daerah, serta kerabat atau kenalan pejabat dinas setempat.

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, banyaknya tenaga honorer bagian administrasi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) justru membebani anggaran. Banyaknya tenaga honorer menjadi salah satu modus yang dilakukan kepala daerah untuk melambungkan anggaran belanja pegawai.

Padahal, tidak sedikit dari daerah itu bergantung pada kucuran dana dari peme-

rintah pusat karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil atau hanya sekitar 2 sampai 3 persen.

"Dan ini ada modus yang lain yang memang harus diselesaikan, ini cukup mendasar ini, yaitu banyaknya tenaga honorer," kata Tito saat menyampaikan paparannya di kantor Kemendagri pusat, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Contohnya, ada daerah yang menganggarkan belanja operasional 67 persen dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara di sisi lain, 90 persen keuangan Pemda itu masih bergantung dari pemerintah pusat. Sebanyak 90 persen dana itu sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai mulai dari gaji, tunjangan, dan lainnya. Belanja anggaran itu juga digunakan buat tenaga honorer.

Berdasarkan pengamatan Tito, daerah-daerah yang bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, anggarannya "tersedot" ke belanja pegawai yang tidak memiliki keahlian khusus. Selain itu, tenaga honorer bagian administrasi banyak diisi oleh tim sukses (timses) atau keluarga kepala daerah, serta

kerabat atau kenalan pejabat dinas setempat.

Tito menekankan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mesti lebih teliti dan mendalam, serta memantau berbagai perencanaan instansi pemerintah tempat mereka bertugas.

Menurut Tito, APIP memiliki fungsi yang strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh instansi atau kepala daerah terkait. Mereka diharapkan tidak hanya mengaudit masalah pidana di instansi terkait, melainkan seperti mutasi, perilaku anggota, hingga efisiensi anggaran.

"Salah satu upaya dari

pengecangan itu adalah dengan memperkuat APIP-APIP ini, sehingga tidak terjadi masalah hukum," kata Tito.

"Prinsipnya bagaimana kita memperkuat pencegahan," katanya.

Pencegahan Korupsi (Stranas PK) merupakan program lintas kementerian dan lembaga yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemendagri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan lainnya. Stranas PK mencanangkan sejumlah aksi yang fokus pada pencegahan korupsi di berbagai sektor, termasuk keuangan pemerintah daerah. ● mei

## Panglima TNI Ultimatum Prajurit Cawe-Cawe pada Pemilu 2024 akan Diberi Sanksi Berat

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan, akan memberikan sanksi berat jika didapatkan ada prajuritnya tidak netral di Pemilu 2024. Yudo juga akan membuat aturan kepemiluan bagi prajuritnya.

Adapun aturan tersebut dibuat untuk menjaga netralitas dan menghilangkan keragu-raguan prajurit dalam Pemilu 2024. Serta, mengatur secara detail sikap TNI dalam Pemilu 2024.

"Aturan itu akan berupa Keppang (Keputusan Panglima) dan juga nantinya akan dibuatkan buku saku," ujar Yudo di Jakarta dikutip pada Kamis (14/9).

Mantan KSAL ini juga menekankan kepada seluruh jajarannya melalui para Pangkotama dari Matra Darat, Laut dan Udara agar tetap mengedepankan netralitas

tanpa batas.

Netralitas TNI kata Yudo juga akan berlaku pada punawirawan. Karena tidak boleh ada Punawirawan yang menggunakan hal-hal berbau dinas digunakan dalam kampanye atau menghadiri kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu. "Tidak boleh ada atribut TNI yang di pakai kampanye, misalnya kendaraan berplat Dinas, tidak boleh itu," ungkapnya.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 nanti, Yudo menyampaikan tentang sanksi bagi Prajurit TNI yang melanggar ketentuan netralitas TNI, dari mulai hukuman disiplin sampai hukuman pidana, tergantung apa yang di langgar oleh prajurit TNI.

"Sanksi bisa berupa hukuman disiplin atau hukuman pidana, tergantung sejauh mana apa yang dilakukan prajurit," katanya. ● lus

## Pentolan KKB Marko Murib Tewas Ditembak Pasukan Elite Raider dari Jarak Hampir 1 Km

JAYAPURA (IM) - Personel Satgas Yonif Raider 300/Bjw (Batalyon Infanteri Raider 300/Braja Wijaya) menembak Marko Murib anggota teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang merupakan anak buah Titus Murib di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Dansatgas Mobile Raider 300 Siliwangi, Letkol Inf Afri Swandi Ritonga mengatakan, Marko Murib tewas ditembak prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 300/Bjw atas nama Praka Lutfi Agus Hermawanto.

Peristiwa itu terjadi saat anggota sedang melaksanakan patrol rutin di Ilaga. Anggota saat itu mendapatkan informasi KKB akan kembali melakukan pembakaran terhadap tower telekomunikasi sehingga dilakukannya patrol.

Saat tim yang dipimpin Dantim Waltis Satgas Yonif 300/Bjw Letda Inf Yusuf Mulyono, melihat dua anggota KKB membawa dua

pucuk senjata api laras panjang namun keduanya langsung melarikan diri sehingga terjadi pengejaran dan terjadi kontak tembak.

"Kontak tembak yang berlangsung sekitar lima jam itulah Marko Murib alias Merinus Murib tewas tertembak," ujar Letkol Inf Ritonga dalam keterangannya dikutip, Kamis (14/9).

Lebih lanjut dia mengatakan, anggota KKB teroris itu berhasil ditembak anggota dari jarak hampir 1 kilometer atau kurang lebih 650 meter.

KKB teroris juga melakukan pembakaran terhadap rumah petugas kesehatan namun tidak ada korban jiwa.

"Tidak ada korban jiwa dalam insiden pembakaran tersebut dan api berhasil dipadamkan tim gabungan TNI-Polri dibantu masyarakat," tutup Letkol Inf Afri Swandi Ritonga. ● mei



FOTO: ANTARA

### RAKER KOMISI VI DPR DENGAN KEMENTERIAN BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo (kiri) dan Wakil Menteri BUMN II Rosan Roeslani (kanan) menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9). Rapat tersebut menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran (RKA) Kementerian BUMN Tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp308,016 miliar.